

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pentingnya Pencatatan Akuntansi Bagi UKM**

Menurut Darmadji (2007:200), dengan tidak melakukan pembukuan, pemilik dan manajer UKM tidak akan mampu untuk mengelola badan usaha secara baik akibat minimnya informasi yang ada serta diragukannya reliabilitas dari informasi yang dimilikinya. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat disusun secara sederhana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari badan usaha, namun tidak mengurangi esensi serta manfaat dari penerapan sistem tersebut.

Pemanfaatan dari sistem akuntansi yang baik, juga memungkinkan disusunnya laporan keuangan dan analisis rasio sebagai dasar bagi manajemen dan pemilik UKM untuk menilai kemampuan, likuiditas, solvabilitas, serta berbagai ukuran lain bagi kepentingan pengambilan keputusan manajerial dan strategis lainnya. Darmadji (2007:200) menambahkan bahwa, penyusunan sistem akuntansi pada UKM harus tetap berupaya untuk mencapai pengendalian internal yang baik, dimana tujuan pengendalian internal adalah untuk mengamankan seluruh aset atau harta kekayaan dari badan usaha, meningkatkan keakuratan pencatatan dan informasi akuntansi, mendorong kegiatan operasional badan usaha yang berdasar pada efektivitas dan efisiensi, serta dipatuhinya segala kebijakan dari pemilik dan manajer UKM oleh seluruh karyawannya.

## **2.1.2 Laporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Sulistiawan dan Feliana (2006:34), laporan keuangan merupakan produk akhir akuntansi, dimana melalui laporan ini pengguna bisa melihat rekapitulasi transaksi atau kejadian ekonomis selama satu periode yang memberikan informasi tentang badan usaha untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Reeve (2005:24), laporan keuangan adalah rekapitulasi transaksi keuangan yang dicatat dan diikhtisarkan selama periode tertentu untuk disiapkan bagi pengguna informasi keuangan. Skousen memberikan definisi yang lebih sederhana mengenai laporan keuangan dalam Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi (2001:28) yakni laporan ringkas yang menunjukkan bagaimana suatu bisnis beroperasi dan dimana letak kesuksesan dan kegagalan suatu entitas dalam mengelola bisnisnya.

### **2.1.2.2 Macam Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjabarkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna (2009:1). Menurut Stice (2009:10), laporan keuangan merupakan laporan-laporan yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang mengikhtisarkan posisi dan hasil keuangan dari operasi suatu entitas bisnis.

Terdapat 4 (empat) macam laporan keuangan yang perlu diaplikasikan entitas yang mengacu SAK ETAP (2009:17) :

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan), menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan entitas pada periode waktu tertentu.
2. Laporan Laba Rugi, menyajikan informasi pendapatan dan beban entitas selama periode waktu tertentu.
3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan modal ekuitas pada periode waktu tertentu. Sedangkan laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan informasi mengenai laba atau rugi entitas dan perubahan saldo labanya pada waktu tertentu.
4. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi tentang perubahan histori akun kas dan setara kas entitas pada periode waktu tertentu.

#### **2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan**

SAK ETAP (2009:3) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu badan usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Menurut Belkoui (2006:126), tujuan laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

#### **2.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan**

Menurut DSAK IAI (2009:2), ada sepuluh karakteristik informasi yang meruoakan ciri khas laporan keuangan :

1. Dapat Dipahami  
Laporan Keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna dengan sumsi pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi



dan bisnis serta kemauan untuk mempelajari laporan tersebut dengan ketentuan wajar.

2. **Relevan**  
Laporan keuangan yang dibuat memiliki kualitas yang relevan bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan, yang mana laporan tersebut membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan, dan serta membantu pengguna mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. **Materialitas**  
Laporan yang dibuat dapat menghindari kelalaian untuk mencantumkan informasi atau kesalahan pencatatan informasi yang dapat berpengaruh pada keputusan ekonomi yang diambil pengguna laporan keuangan.
4. **Keandalan**  
Laporan keuangan yang dibuat memiliki kualitas andal, yakni kualitas laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material dan bias serta kualitas laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan jujur.
5. **Substansi Mengungguli Bentuk**  
Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.
6. **Pertimbangan Sehat**  
Laporan keuangan yang dibuat memiliki pertimbangan sehat yang tidak mengizinkan bias. Saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, laporan keuangan perlu disajikan secara berhati-hati agar tidak menyajikan penghasilan yang lebih tinggi dan kewajiban atau beban yang lebih rendah.
7. **Kelengkapan**  
Laporan keuangan yang dibuat memiliki materialitas yang lengkap dalam maerialitas dan biaya.
8. **Dapat Dibandingkan**  
Laporan Keuangan yang dibuat memudahkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan entitas antar periode sehingga memudahkan mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan.
9. **Tepat Waktu**  
Laporan keuangan yang dibuat tepat waktu dalam menyediakan informasinya bagi pengguna. Penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan dapat menghasilkan informasi yang kehilangan relevansi.
10. **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat**  
Manfaat informasi yang disajikan seharusnya melebihi biaya penyediaannya.

### **2.1.3 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Koreksi Kesalahan**

#### **2.1.3.1 Kebijakan Akuntansi**

Menurut Hendriksen (1993:109), kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan alternatif, sistem pengukuran, dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang tersedia untuk pelaporan keuangan oleh perusahaan. Akan tetapi dalam artinya yang lebih luas, kebijakan akuntansi mengacu pada standar akuntansi, pendapatan, interpretasi, aturan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan yang dapat diwajibkan dengan beberapa cara. Di Indonesia badan yang paling relevan adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

Pada 1 Januari 2009 DSAK IAI menerbitkan kebijakan bahwa suatu entitas tanpa akuntabilitas publik dapat memilih untuk menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum. Apabila pada tahun 2009 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik menerapkan penggunaan PSAK umum, maka entitas tersebut tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan PSAK ETAP. Entitas tanpa akuntabilitas publik perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut karena penerapan suatu PSAK mencakup isu strategis dan sekali suatu entitas menerapkan untuk menggunakan PSAK umum maka tidak ada lagi kesempatan merevisi kebijakan menggunakan PSAK ETAP.

Dikatakan mencakup isu strategis karena entitas tanpa akuntabilitas publik yang banyak beredar saat ini berupa UKM yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, sehingga akan lebih sederhana jika menggunakan PSAK ETAP. Sedangkan jika entitas memiliki rencana untuk mengembangkan

usahanya menjadi berskala menengah besar yang tentunya menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan, atau bahkan melibatkan pihak internasional dan sebagainya, maka entitas perlu mempertimbangkan untuk menggunakan PSAK umum.

### **2.1.3.2 Perubahan Estimasi Akuntansi**

Menurut DSAK IAI (2009:40), perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau kewajiban atau jumlah konsumsi periodik suatu aset yang berasal dari pengujian status dari sekarang dan ekspektasi manfaat ekonomi serta kewajiban masa mendatang terkait dengan aset dan kewajiban. Setiap perubahan estimasi dan dampak perubahan pada aset, kewajiban, penghasilan dan beban pada periode berjalan harus diungkap oleh entitas. Bila praktis, entitas juga dapat mengungkapkan estimasi dampak perubahan tersebut untuk satu atau lebih periode mendatang.

### **2.1.3.3 Koreksi Kesalahan Periode Lalu**

Menurut DSAK IAI (2009:41), kesalahan periodelalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal : a) yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; dan b) diekspektasi dengan layak seharusnya diperoleh dan dimasukkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.



Adapun Koreksi kesalahan masa lalu yang harus diungkapkan dai periode lalu, dengan acuan DSAK IAI (2009:42), yakni :

- a. Sifat kesalahan;
- b. Jumlah pos tiap laporan keuangan yang terpengaruh, jika praktis;
- c. Jumlah koreksi awal periode lalu;
- d. Kondisi ketidakpraktisan, jika penyajian kembali secara restropektif tidak praktis, dan deskripsi mengenai bagaimana dan kapan kesalahan tersebut dikoreksi.

#### **2.1.4 SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)**

Menurut DSAK IAI (2009:1), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun, entitas yang memiliki akuntabilitas public signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Sedangkan entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan apabila memenuhi karakteristik dibawah ini:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dana pension, reksadana, dan bank investasi.

### 2.1.5 Persediaan

Menurut Reeve (2005:452), Persediaan digunakan untuk mengindikasikan (1) barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan (2) bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan dijual dalam operasi bisnis perusahaan. Sedangkan menurut DSAK IAI (2009:52) Persediaan merupakan aset yang dipergunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa; aset yang dipergunakan dalam proses produksi untuk dijual kembali; atau aset yang dijual dalam kegiatan usaha normal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa biaya untuk memperoleh persediaan meliputi seluruh biaya pembelian (harga beli, bea impor, biaya pengangkutan, biaya penanganan); biaya konversi (biaya produksi langsung yang termasuk alokasi sistematis bahan baku menjadi barang jadi); dan biaya lainnya yang timbul untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Sedangkan yang tidak termasuk biaya untuk memperoleh persediaan meliputi biaya bahan yang tidak terpakai, biaya penyimpanan kecuali yang diperlukan dalam proses produksi periode tersebut, biaya *overhead* administrative yang tidak berkontribusi saat membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang, dan biaya penjualan. Biaya persediaan ditentukan dengan metode *first in first out* (FIFO) dan metode rata-rata



tertimbang. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas tidak mengakui metode *last in first out* (LIFO).

Nilai persediaan diukur dari biaya perolehan dan harga jual (dipilih yang paling rendah) dikurangkan dengan biaya penyelesaian dan penjualan. Menurut DSAK IAI (2009:57), yang harus diungkap oleh entitas yakni :

- a. Kebijakan untuk menentukan biaya persediaan, apakah menggunakan MPKP atau rata-rata tertimbang;
- b. Jumlah total persediaan dan klasifikasinya;
- c. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban, yakni persediaan yang dijual dimana pendapatan yang terkait diakui;
- d. Penurunan nilai persediaan dan pemulihannya;
- e. Jumlah persediaan yang digunakan.

Penurunan nilai persediaan diukur berdasarkan harga jual dikurangkan dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Kerugian dari penurunan nilai persediaan harus diakui.

#### **2.1.6 Properti Investasi**

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, peralatan, serta aktiva lainnya yang dikuasai oleh pemilik atau oleh *lessee* melalui sewa pembiayaan yang tidak ditahan untuk dijual kembali atau untuk tujuan administrative (DSAK IAI, 2009: 66). Saat pengakuan awal, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya legal; dan *broker*, biaya pajak pengalihan dan biaya transaksi lainnya. Setelah pengakuan awal, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan yang dikurangkan dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan lainnya.

### 2.1.7 Aset Tetap

Menurut DSAK IAI (2009:68), aset tetap adalah aset berwujud yang :

- a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan:
- b) diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Entitas harus mengakui biaya perolehan sebagai aset tetap apabila ada kemungkinan aset tetap dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang mengalir dari dan ke dalam entitas dan pos tersebut (aset tetap) nilainya dapat dikukur dengan andal.

Saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya-biaya beratribusi langsung dalam membawa aset tetap ke kondisi dan lokasi sekarang, dan estimasi awal biaya pembogkaran aset, biaya pemindahan aset, da biaya restorasi lokasi. Biaya perolehan aset tetap setara dengan harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melebihi waktu normal, biaya perolehan didasarkan nilai tunai semua pembayaran di masa mendatang.

Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangkan dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Oleh karena SAK ETAP menganut penilaian aset tetap berdasarkan nilai perolehan atau harga pertukaran, maka revaluasi aste tetap tidak diperkenankan.

Saat aset tetap dilepaskan atau manfaat ekonomi aset tetap tersebut tidak ada lagi yang dapat diekspektasikan, maka pengakuan aet tetap harus dihentikan. Keuntungan atau kerugian atas penghentian aset tetap tersebut harus diakui dalam

laporan laba rugi namun keuntungannya tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Dalam SAK ETAP (2009:75) untuk setiap kelompok aset tetap harus mengungkapkan :

- a. dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. metode penyusutan yang digunakan.
- c. umur manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya pada awal dan akhir periode
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan, penyusutan, dan perubahan lainnya, pada awal dan akhir periode.

#### **2.1.8 Aset Tidak Berwujud**

Menurut DSAK IAI (2009:76), aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset dapat diidentifikasi apabila dapat dipisahkan (saat dijual, dialihkan, ditukarkan, atau disewakan melalui kontrak, aset dapat terpisah dari entitas) dan aset tersebut muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Entitas harus mengakui aset tidak berwujud apabila ada kemungkinan aset tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang mengalir dari dan ke dalam entitas dan pos tersebut (aset tidak berwujud) nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan awal aset tidak tetap berwujud diukur sebesar biaya perolehan yang terdiri dari harga beli setelah diskon dan potongan dagang dan biaya-biaya yang beratribusi langsung dalam membawa aset tidak berwujud dalam kondisi dan lokasi sekarang. Setelah itu, aset tidak berwujud diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangkan dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. DSAK IAI (2009:79) menjabarkan bahwa “umur manfaat aset tidak berwujud yang



berasal dari hak kontraktual atau hak hukum tidak boleh melebihi hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung periode ekspektasi penggunaan aset tidak berwujud tersebut.”

Dalam DSAK IAI (2009:81) juga menjelaskan hal-hal yang harus diungkapkan oleh entitas, yaitu:

- a. umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
- b. metode amortisasi yang digunakan;
- c. jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- d. amortisasi aset tidak berwujud pada laporan laba rugi;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan, penyusutan, dan perubahan lainnya pada awal dan akhir periode.

#### **2.1.9 Sewa**

Menurut Kieso (2011:1093) mengklasifikasi sewa ada dua, sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa pembiayaan mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset, sedangkan sewa operasi tidak mengalihkan. Sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. pada akhir masa sewa, kepemilikan aset dialihkan kepada penyewa;
- b. pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar;
- c. masa sewa meliputi sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan, yakni 75% atau lebih;
- d. pada masa awal sewa, nilai kini dari awal pembayaran sewa secara substansial minimum 90% atau lebih dari nilai wajar aset sewaan;
- e. penyewa dapat menggunakan aset sewaan tanpa perlu modifikasi secara material.

Dalam laporan keuangan sewa pembiayaan (DSAK IAI, 2009:85), penyewa harus mengungkapkan :

- a. jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar;
- b. penyusutan aset sewaan yang harus dibebankan;

- c. jaminan yang diberikan dalam transaksi sewa;
- d. keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan beserta amortisasinya dalam transaksi jual dan sewa balik;
- e. ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa.

Sedangkan hal yang harus diungkapkan pada laporan keuangan pihak yang menyewakan menurut DSAK IAI (2009:87) :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan;
- b. jumlah pembayaran sewa;
- c. sifat dari simpanan jaminan;
- d. piutang sewa yang dijaminan kepada pihak ketiga.

Kieso (2011:1131) menjelaskan mengenai sewa operasi :

*“ Under the operating method, rent expense (and the associated liability) accrues day by the day to the lessee as it uses the property. The lessee assigns rent to the periods benefiting from the use of the asset and ignores, in the accounting, any commitments to make future payments. The lessee makes appropriate accruals or deferrals if the accounting period ends between cash payments dates.”*

Pembayaran sewanya merupakan beban yang diakui dengan menggunakan metode garis lurus dengan pembayaran yang sama setiap periode. Dalam laporan keuangan sewa operasi (DSAK IAI, 2009:86), penyewa harus mengungkapkan :

- a. jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar;
- b. jumlah pembayaran sewa yang harus diakui sebagai beban sewa;
- c. jaminan yang diberikan dalam transaksi sewa;

- d. keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya dalam transaksi jual dan sewa balik;
- e. ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa.

Sedangkan hal yang harus diungkapkan pada laporan keuangan pihak yang menyewakan (DSAK IAI, 2009:87) adalah :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan;
- b. jumlah pembayaran sewa;
- c. sifat dari simpanan jaminan;
- d. piutang sewa yang dijaminan kepada pihak ketiga.

#### **2.1.10 Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi**

Entitas harus mengakui kewajiban apabila ada kemungkinan kewajiban tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang mengalir dari dan ke dalam entitas dan pos tersebut (kewajiban diestimasi) nilainya dapat diukur dengan andal. Selain itu, kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu juga harus diakui sebagai kewajiban diestimasi. Dalam neraca, kewajiban diestimasi diakui sebagai kewajiban dan jumlahnya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi kecuali kewajiban tersebut termasuk dalam biaya untuk memproduksi persediaan atau termasuk dalam nilai aset tetap (DSAK IAI, 2009:90)

Setelah pengakuan awal, kewajiban diestimasi diukur berdasarkan hasil estimasi terbaik pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban kini. Apabila populasinya terdiri dari sejumlah besar unsur maka hasil estimasi terbaik ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil probabilitas, apabila



yang diukur hanya satu maka hasil estimasi terbaik ditentukan yang probabilitasnya paling tinggi (DSAK IAI, 2009:91).

Dalam SAK ETAP (2009:93), untuk kelompok kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan :

- a. jumlah tercatat di awal dan akhir periode;
- b. kewajiban tambahan pada periode berjalan;
- c. jumlah yang digunakan selama periode berjalan;
- d. jumlah yang belum digunakan selama periode berjalan;
- e. peningkatan dalam nilai kini;
- f. sifat kewajiban dan perkiraan saat arus keluar terjadi;
- g. indikasi ketidakpastian jumlah dan saat pengeluaran kas;
- h. jumlah ekspektasi pengganti.

Untuk kewajiban diestimasi kontijensi, entitas harus mengungkapkan uraian dan sifat kewajiban kontijensi. Jika praktis, entitas juga mengungkapkan estimasi dampak pengukuran keuangan dan indikasi ketidakpastian jumlah dan pengeluaran kas.

DSAK IAI (2009:92) mendefinisikan kewajiban kontijensi sebagai “ ... kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi (b) dan (c) pada paragraf 18.4.” yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut yakni kemungkinan menghasilkan manfaat ekonomi dari dan ke dalam entitas dan keandalan pengukuran nilai kewajiban kontijensi. Aset kontijensi tidak diperkenankan diakui sebagai aset.

Entitas harus mengungkapkan uraian dan sifat kewajiban kontijensi. Jika praktis, entitas juga mengungkapkan estimasi dampak pengukuran keuangan dan indikasi ketidakpastian jumlah dan pengeluaran kas.

### 2.1.11 Ekuitas

Bentuk hukum entitas dan ekuitas bermacam-macam. Diantaranya adalah entitas perorangan, firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), PT (Perseroan Terbatas), dan koperasi. Klasifikasi instrumen keuangan terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kewajiban merupakan instrumen keuangan yang mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa mendatang sedangkan ekuitas merupakan instrumen keuangan berupa hak proporsional atas deviden atau distribusi (DSAK IAI, 2009:104).

Dalam neraca, modal disajikan sesuai ketentuan pendirian akta entitas dan peraturan yang berlaku, serta menggambarkan hubungan yang ada dalam neraca. Untuk entitas yang berupa CV, modal harus dipisahkan antara modal persero aktif dan modal persero komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang menjadi bagiannya.

Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima, setoran saham tunai sesuai transaksi nyata, besarnya tagihan yang timbul, besarnya deviden yang sesuai kesepakatan antara persero aktif dan persero komanditer, nilai wajar aset bukan kas yang diterima, dan besarnya setoran saham

berbentuk barang yang menggunakan nilai wajar aset bukan kas. Saldo laba bebas untuk dibagikan sebagai batasan adalah jumlah prosentase modal yang disetorkan kedalam CV.

Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas wajib mengungkapkan kejadian-kejadian penting seperti penjualan kepemilikan modal, deklarasi pembagian laba sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitulasi, dan transaksi modal yang lain setelah tanggal laporan keuangan.

#### **2.1.12 Pendapatan**

Menurut Kieso dkk. (2011:996), pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan tersebut, yakni, apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Keuntungan (bila dibedakan dengan pendapatan) biasanya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang tidak melibatkan “proses menghasilkan laba.” Untuk pengakuan keuntungan, status dihasilkan biasanya kurang signifikansi dibandingkan status direalisasi atau dapat direalisasi. Keuntungan biasanya diakui pada saat penjualan aktiva, disposisi kewajiban, atau ketika harga aktiva tertentu berubah.

Entitas harus mengakui pendapatan apabila ada kemungkinan pendapatan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang mengalir dari dan ke dalam entitas dan pos tersebut (pendapatan) nilainya dapat diukur dengan andal. Dalam SAK ETAP (DSAK IAI, 2009:114) pendapatan muncul karena transaksi-transaksi



seperti penjualan barang, baik yang diproduksi sendiri oleh entitas maupun yang dibeli entitas untuk dijual kembali, pemberian jasa, kontrak konstruksi, serta penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau deviden.

Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar pembayaran yang diterima atau masih harus diterima setelah dikurangi diskon penjualan dan potongan volume. Apabila transaksi pembayarannya ditangguhkan, maka nilai wajar pembayarannya merupakan nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait. Dalam transaksi pertukaran barang atau jasa, pendapatan diakui jika barang atau jasa yang ditukar dengan barang atau jasa lainnya yang tidak serupa dan transaksinya diukur berdasarkan nilai wajar. Kecuali, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang ditukarkan tidak dapat diandalkan. Dalam SAK ETAP (2009:116), hasil transaksi penjualan barang harus diakui bila :

- a. risiko dan manfaat barang yang signifikan telah dialihkan kepada pembeli;
- b. keterlibatan manajerial entitas tidak dipertahankan atau diteruskan sampai dengan tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
- c. pendapatan dapat diukur secara andal;
- d. manfaat ekonomi yang didapat dari transaksi pendapatan kemungkinan besar mengalir masuk ke dalam entitas;
- e. biaya yang telah atau akan terjadi dapat diukur andal;

Hasil transaksi pemberian jasa yang dapat diukur secara andal harus diakui sebagai pendapatan sesuai dengan tahap penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan (terkadang disebut sebagai metode presentase penyelesaian). Pendapatan dari transaksi pemberian jasa dapat diukur secara andal (DSAK IAI, 2009:118) apabila :

- a. jumlahnya dapat diukur secara andal;
- b. manfaat ekonomi yang didapat dari transaksi pemberian jasa kemungkinan besar akan mengalir ke dalam entitas;
- c. tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal;
- d. biaya transaksi dan penyelesaiannya dapat diukur secara andal.

Untuk kelompok pendapatan, entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan serta jumlah kategori pendapatan (penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, royalti, deviden, dan jenis pendapatan lain yang signifikan) yang diakui selama periode berjalan.

### **2.1.13 Beban (*Expenses*)**

Menurut DSAK IAI (2009:168), beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal. Sedangkan menurut Hendriksen (1993:177), beban adalah penggunaan atau pemakaian barang dan jasa di dalam proses mendapatkan pendapatan. Beban merupakan habisnya (*expirations*) jasa

faktor yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembuatan dan penjualan produk perusahaan. Nilai jasa dari faktor ini berakhir pada saat nilai ini meniggalkan perusahaan, yaitu sudah habis terpakai atau produk berpindah ke pelanggan; nilai itu meupakan habisnya jasa faktor yang dikaitkan dengan pengukuran baru nilai produk perusahaan apabila pendapatan dilaporkan sebelum penjualan.

Pengukuran barang dan jasa yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dapat dipecahkan dengan sederhana. Hal ini terjadi karena tujuan pengukuran itu tidak jelas dirumuskan, dan pengukuran yang dirasa cocok sangat ditentukan konsep laba yang diterapkan. Menurut pandangan laba yang manapun, tujuannya adalah mengukur jumlah yang dibebankan pada periode berjalan dan menunda ke periode yang akan atang jumlah yang menggambarkan perubahab barang atau jasa yang akan diakai dalam periode mendatang tersebut. Pengukuran beban paling umum adalah: (1) biaya historis, (2) nilai berjalan seperti biaya pengganti, (3) biaya oportunitas atau ekuivalen kas pada saat berjalan.

Saat pengakuan atau pelaporan beban dilakukan dengan mencatat kegiatan didalam perkiraan atau memasukannya di dalam laporan keuangan. Pengakuan beban harus diakui pada periode dimana pendapatan tersebut diakui. Inilah proses *matching* (penandingan) – yaitu saat pengakuan pendapatan terlebih dahulu, kemudian menyusul pelaporan bebannya pada periode yang sama.

#### **2.1.14 Biaya Pinjaman**

Menurut DSAK IAI (2009:123), “Biaya pinjaman adalah bunga dan pinjaman lainnya yang timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas. Biaya pinjaman mencakup :

- a. bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang;
- b. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian;
- d. beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan yang sesuai dengan sewa;
- e. perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing dimana perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga.”

Biaya pinjaman harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya dan besarnya pinjaman yang harus diungkapkan.

#### **2.1.15 Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang berisi : “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar



Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Menurut DSAK IAI (2009:147) Entitas harus mengakui kewajiban seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode melebihi jumlah terutang, maka entitas harus mengakui sebagai aset. Entitas harus mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen pajak penghasilan.

#### **2.1.16 Imbalan Kerja**

Menurut DSAK IAI (2009:131), imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Entitas harus mengakui biaya atas imbalan kerja yang menjadi hak para pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan :

- a. sebagai kewajiban setelah dikurang jumlah yang telah dibayar baik secara langsung kepada para pekerja atau sebagai kontribusi kepada dana imbalan kerja. Jika pembayaran kontribusi melebihi jumlah kewajiban yang timbul dari jasa sebelum tanggal pelaporan maka entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset dibayar dimuka yang akan mengurangi pembayaran masa datang atau sebagai pengembalian kas;
- b. sebagai beban kecuali bab lain mensyaratkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan suatu aset seperti persediaan atau aset tetap.

### 2.1.17 Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan

Ediraras (2010), pengelolaan keuangan yang baik dan transparan memerlukan pengetahuan dan keterampilan akuntansi secara baik oleh pelaku UKM. Kemampuan pelaku UKM dalam memberikan informasi keuangan yang akurat akan sangat ber-dampak terhadap *stakeholder* bisnis UKM tersebut, misalnya kreditor, pemasok, karyawan dan manajemen, dewan standar. Bisnis UKM yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak yang positif terhadap bisnis UKM itu sendiri.

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan Putra dan Kurniawati (2012), ditemukan kendala:

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Karyawan yang dimiliki tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi.
- b. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar bidang karena pemilik sekaligus menjadi pengelola usaha. Pemilik mengelola usaha sendiri, sehingga waktu yang dimiliki difokuskan untuk mengembangkan usahanya. Karyawan hanya diberikan otoritas untuk mengatasi proses produksi dan pencatatan biaya.

Lailatul (2009) menjelaskan faktor yang mempengaruhi penyusunan Laporan Keuangan UKM. Berikut adalah hasil penelitian:

**Tabel 2.1****Faktor Penyusunan Laporan Keuangan**

<b>Faktor</b>	<b>Pendukung</b>	<b>Penghambat</b>
Pemilik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran akan pentingnya laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis minimal untuk pengawasan bagi usahanya.</li> <li>2. Mengeluarkan biaya lebih untuk pengembangan karyawan dalam menyusun laporan keuangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabaikan pentingnya laporan keuangan.</li> </ol>
Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.</li> <li>2. Mengikuti pelatihan akuntansi secara berkala.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya karyawan yang memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan terkadang terlalu tinggi.</li> <li>2. Kurangnya/Tidak adanya pelatihan akuntansi.</li> </ol>
Stakeholder (Bank, dll)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan bagi para debitur untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK.</li> </ol>	
Dewan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempublikasikan penyuluhan / pelatihan bagi para pelaku bisnis UKM.</li> <li>2. Membuat regulasi yang mempermudah bagi para UKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan / Pelatihan kurang terpublikasi dengan baik sehingga para pelaku bisnis UKM bisa mengikuti.</li> <li>2. Regulasi yang sulit dipahami oleh para pelaku bisnis UKM.</li> </ol>

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putra dan Kurniawati (2012) dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)” dengan hasil kesimpulan bahwa kendala dalam pembuatan laporan keuangan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang ada lebih difokuskan pada kegiatan operasional usaha, dan Aplikasi *Microsoft Excel* dengan formula yang telah dirancang dapat mempermudah UKM dalam menghasilkan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian yaitu mengevaluasi penerapan SAK ETAP yang diterapkan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pada tahun yang sama dilakukan juga penelitian oleh Tyas dan Facriyah tentang “Evaluasi Standar Akuntansi Keuangan Dalam Pelaporan Aset Biologis (Studi Kasus Pada Koperasi “M”)” dengan kesimpulan bahwa penerapan SAK ETAP dalam pelaporan akuntansi aset biologis yang telah dilakukan oleh Koperasi “M” belum sepenuhnya dilakukan dengan sesuai. Beberapa poin yang sesuai adalah mengenai pengakuan akun TBM dan TM serta penggunaan metode biaya historis dalam pengukuran unsur-unsur biaya terkait aset biologis. Sedangkan poin ketidaksesuaiannya adalah:

1. Koperasi “M” tidak mengakui adanya penyusutan atas akun Tanaman Menghasilkan. Hal ini bertentangan dengan standar akuntansi dalam SAK



ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap, Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN 2011, dan PSAK No. 16 Revisi 2011 tentang Aset Tetap, yang semuanya mengharuskan adanya penyusutan pada aset yang telah memberikan nilai manfaat bagi entitas. Beban penyusutan atas aset biologis pada tanaman menghasilkan juga seharusnya menjadi salah satu unsur penambah dalam perhitungan nilai persediaan hasil panennya.

2. Koperasi “M” tidak mengakui adanya akun Persediaan untuk menampung nilai atas hasil panen (Tandan Buah Segar/ TBS) tanaman kelapa sawit. Selama ini Koperasi “M” langsung membebankan semua biaya perolehan TBS ke dalam beberapa akun biaya yang berhubungan dengan aktivitas panen. Hal ini bertentangan dengan konsep dan aturan mengenai persediaan yang ada dalam PSAK No. 14 Revisi 2008 dan Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN 2011.
3. Koperasi “M” tidak mengakui adanya beban kerugian atas bagian aset biologis yang mengalami kerusakan atau cacat baik dalam masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM) maupun pada saat penyortiran hasil Tandan Buah Segar (TBS). Pelaporan atas nilai yang berkaitan dengan reklasifikasi langsung dilakukan pada nilai bersihnya (setelah dikurangkan dengan barang rusak atau cacat). Hal ini bertentangan dengan peraturan mengenai penurunan nilai aset yang ada pada PSAK No. 48 Revisi 2009.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyas dan Facriyah (2012) yaitu tentang evaluasi penerapan SAK ETAP. Sedangkan

perbedaannya terletak pada objek penelitian, pada penelitian sebelumnya objeknya menggunakan bentuk badan usaha Koperasi namun penelitian ini menggunakan bentuk badan usaha *Comonditier Volunteer (CV)*.

Auliyah (2012) melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP pada 5 (lima) pelaku bisnis UKM Kampung Batik di Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif (*naturalistic*) yaitu dengan meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Ditinjau dari jenis data dan analisisnya merupakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif biasanya suatu pernyataan/pernyataan yang memerlukan alternatif jawaban. Penelitian yang dilakukan Auliyah (2012) menyimpulkan bahwa :

1. Semua informan yang merupakan pemilik sekaligus pengelola UKM di kampung batik sidoarjo memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lain mengenai akuntansi.
2. Sebagian besar pengusaha pada UKM kampung Batik Sidoarjo telah menerapkan akuntansi sederhana pada usaha mereka. Hal tersebut terlihat dari pembukuan sederhana yang mereka miliki.
3. Beberapa pengusaha kampung batik memiliki laporan keuangan sederhana yang mereka gunakan untuk evaluasi serta control bagi usaha yang sedang mereka jalankan. Laporan keuangan yang dibuat adalah laporan laba rugi dengan format sederhana.
4. Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukan untuk usaha kecil dan menengah,

keberadaannya belum banyak diketahui oleh para pemilik UKM di wilayah kampung batik sidoarjo. Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama kurang dikenalnya SAK ETAP dilingkungan UKM.

5. Banyak dari pengusaha UKM yang antusias dengan adanya SAK ETAP. Hal tersebut diketahui setelah peneliti sedikit mengenalkan SAK ETAP pada informan. Sebagian besar informan berkenan menerapkan SAK ETAP dalam usaha yang dikelola. Sementara disisi lain ada pula yang asih enggan beralih ke SAK ETAP.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Alur kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

